



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 dan Perubahannya, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendesak dalam DPA-SKPD, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Perubahannya, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 005);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 4.968.984.219.000,- bertambah sejumlah Rp. 33.520.444.135,- sehingga menjadi Rp. 5.002.504.663.135,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 4.882.077.980.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.882.077.980.000,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 4.968.984.219.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 33.520.444.135,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 5.002.504.663.135,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (120.426.683.135),-

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 86.906.239.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 33.520.444.135,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	0,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,-
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	120.426.683.135,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

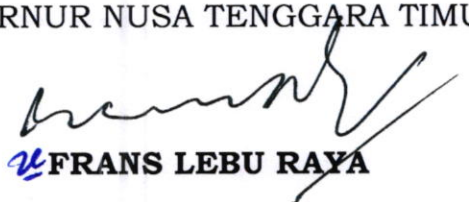
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 0 Juni 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 0 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH

^PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 23 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 Juni 2018

**RINGKASAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Halaman 5

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.882.077.980.000,00	4.882.077.980.000,00	0,00	0,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.061.828.395.000,00	1.061.828.395.000,00	0,00	0,00
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	822.886.747.000,00	822.886.747.000,00	0,00	0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	24.488.354.000,00	24.488.354.000,00	0,00	0,00
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	72.250.000.000,00	72.250.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	142.203.294.000,00	142.203.294.000,00	0,00	0,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	3.799.586.456.000,00	3.799.586.456.000,00	0,00	0,00
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	86.834.315.000,00	86.834.315.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.827.412.640.000,00	1.827.412.640.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.885.339.501.000,00	1.885.339.501.000,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.663.129.000,00	20.663.129.000,00	0,00	0,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	20.663.129.000,00	20.663.129.000,00	0,00	0,00
9.	JUMLAH PENDAPATAN	4.882.077.980.000,00	4.882.077.980.000,00	0,00	0,00
5.	BEBAN - LO	4.968.984.219.000,00	5.002.504.663.135,00	33.520.444.135,00	0,67
5.1.	BELANJA DAERAH	4.968.984.219.000,00	5.002.504.663.135,00	33.520.444.135,00	0,67
5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.307.588.677.000,00	3.313.890.037.000,00	6.301.360.000,00	0,19
5.1.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.317.581.828.000,00	1.317.581.828.000,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	BELANJA HIBAH	1.576.490.160.500,00	1.582.791.520.500,00	6.301.360.000,00	0,40
5.1.1.3.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20.151.000.000,00	20.151.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	386.942.443.500,00	386.942.443.500,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
		1.423.245.000,00	1.423.245.000,00	0,00	0,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA			0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.661.395.542.000,00	1.688.614.626.135,00	27.219.084.135,00	1,64
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.139.983.138,00	144.260.508.138,00	120.525.000,00	0,08
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	962.783.760.684,00	979.279.993.818,00	16.496.233.134,00	1,71
5.2.3.	BELANJA MODAL	554.471.798.178,00	565.074.124.179,00	10.602.326.001,00	1,91
	JUMLAH BELANJA	4.968.984.219.000,00	5.002.504.663.135,00	33.520.444.135,00	0,67
	SURPLUS/(DEFISIT)	(86.906.239.000,00)	(120.426.683.135,00)	(33.520.444.135,00)	38,57
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	38,57
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	38,57
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	80.150.000.000,00	113.670.444.135,00	33.520.444.135,00	41,82
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	6.756.239.000,00	6.756.239.000,00	0,00	0,00
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	38,57
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	38,57
	PEMBIAYAAN NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 23 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 Juni 2018

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN
ORGANISASI : 3.00.03.00. - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Halaman : 7

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.929.174.313.000,00	3.929.174.313.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.8.	PENDAPATAN - LO	3.929.174.313.000,00	3.929.174.313.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	108.924.728.000,00	108.924.728.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	72.250.000.000,00	72.250.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.01.01.	Bagian Laba (Deviden) PT. Flohamor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.01.03.	Bagian Laba (Deviden) PT. JAMKRIDA	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.03.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.03.01.	Bagian Laba (Deviden) PT. BANGUN ASKRIDA	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.04.	Bagian Laba Lembaga Keuangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.04.01.	Bagian Laba (Deviden) PT. Bank NTT	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyeritaan Modal Pada BUMD
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH						
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.	YANG SAH	36.674.728.000,00	36.674.728.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.03.	Pendapatan Bunga	18.028.733.000,00	18.028.733.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.03.01.	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.03.05.	Pendapatan Bunga pemberian pinjaman kepada Kelompok Masyarakat/dunia usaha (Koperasi) -	528.733.000,00	528.733.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.04.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.06.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.06.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.	Pendapatan dari Pengembalian	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.10.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.14.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.14.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.14.03.	Angsuran/Cicilan Penjualan Peralatan dan Mesin	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.17.	Pendapatan Dari Penyisihan Piutang	7.170.995.000,00	7.170.995.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.17.01.	Pendapatan dari Penyisihan Piutang Daerah	7.170.995.000,00	7.170.995.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	3.799.586.456.000,00	3.799.586.456.000,00	0,00	0,00	

8

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN	86.834.315.000,00	86.834.315.000,00	0,00	0,00	
	PAJAK					
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	84.557.194.000,00	84.557.194.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.538.683.000,00	9.538.683.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)	69.865.986.000,00	69.865.986.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.03.	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	5.152.525.000,00	5.152.525.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	2.277.121.000,00	2.277.121.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.01.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	40.297.000,00	40.297.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.02.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	491.061.000,00	491.061.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.03.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	1.745.763.000,00	1.745.763.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.827.412.640.000,00	1.827.412.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.827.412.640.000,00	1.827.412.640.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	1.827.412.640.000,00	1.827.412.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.885.339.501.000,00	1.885.339.501.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	270.856.000.000,00	270.856.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.01.	DAK Reguler	29.841.000.000,00	29.841.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.02.	DAK Penugasan	240.709.000.000,00	240.709.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.03.	DAK Afirmasi	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.614.483.501.000,00	1.614.483.501.000,00	0,00	0,00	

f

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Sekolah	1.405.768.600.000,00	1.405.768.600.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)	198.238.950.000,00	198.238.950.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.03.	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tansil Guru PNSD)	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.04.	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD)	510.029.000,00	510.029.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.05.	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.011.703.000,00	3.011.703.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.06.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.07.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.334.219.000,00	2.334.219.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.663.129.000,00	20.663.129.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	20.663.129.000,00	20.663.129.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	8.683.029.000,00	8.683.029.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.683.029.000,00	8.683.029.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	638.640.000,00	638.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.03.01.	Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	638.640.000,00	638.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Petarangan	11.341.460.000,00	11.341.460.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.04.01.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	11.341.460.000,00	11.341.460.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	3.929.174.313.000,00	3.929.174.313.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.	BELANJA DAERAH	1.990.006.849.000,00	1.996.308.209.000,00	6.301.360.000,00	0,32	
3.00.03.3.00.03.0000.00.9.	BEBAN - LO	1.990.006.849.000,00	1.996.308.209.000,00	6.301.360.000,00	0,32	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.990.006.849.000,00	1.996.308.209.000,00	6.301.360.000,00	0,32	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.576.490.160.500,00	1.582.791.520.500,00	6.301.360.000,00	0,40	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	386.447.560.500,00	389.898.920.500,00	3.451.360.000,00	0,89	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.01.02.	Instansi Vertikal	386.447.560.500,00	389.898.920.500,00	3.451.360.000,00	0,89	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.143.000.000,00	23.993.000.000,00	2.850.000.000,00	13,48	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.01.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perkonomian	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00	

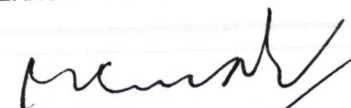
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.02.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	3.075.000.000,00	3.075.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.03	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	2.150.000.000,00	2.000.000.000,00	(150.000.000,00)	(6,98)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.04.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keganjanaan	4.475.000.000,00	6.225.000.000,00	1.750.000.000,00	39,11	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.07.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Keolahragaan	8.500.000.000,00	9.800.000.000,00	1.300.000.000,00	15,29	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.08.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	500.000.000,00	450.000.000,00	(50.000.000,00)	(10,00)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.09.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Informasi	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.10.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.06.	Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.168.899.600.000,00	1.168.899.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.06.01.	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar	1.168.899.600.000,00	1.168.899.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20.151.000.000,00	20.151.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	12.651.000.000,00	12.651.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.01.01.	Yang Dapat direncanakan	8.151.000.000,00	8.151.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.01.02.	Yang Tidak Dapat direncanakan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.	BELANJA BACILIASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	386.942.443.500,00	386.942.443.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	386.942.443.500,00	386.942.443.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Kupang	48.849.030.500,00	48.849.030.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kupang	22.768.237.278,00	22.768.237.278,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sabu Raijua	10.291.258.117,00	10.291.258.117,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rote Ndao	12.543.246.343,00	12.543.246.343,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTS	24.843.538.114,00	24.843.538.114,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTU	17.601.113.419,00	17.601.113.419,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Belu	19.405.735.557,00	19.405.735.557,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Alor	14.196.835.646,00	14.196.835.646,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Flores Timur	16.632.572.128,00	16.632.572.128,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lembata	12.662.116.307,00	12.662.116.307,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sikka	20.955.373.528,00	20.955.373.528,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ende	18.854.998.419,00	18.854.998.419,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ngada	13.422.650.910,00	13.422.650.910,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Nagekeo	12.474.197.427,00	12.474.197.427,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai	20.868.977.562,00	20.868.977.562,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.16.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Timur	15.830.950.668,00	15.830.950.668,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.17.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Barat	16.423.735.156,00	16.423.735.156,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.18.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Timur	17.111.793.991,00	17.111.793.991,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.19.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat	11.802.662.002,00	11.802.662.002,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.20.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat Daya	16.351.464.738,00	16.351.464.738,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.21.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Tengah	9.590.913.300,00	9.590.913.300,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.22.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Malaka	13.461.042.390,00	13.461.042.390,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.423.245.000,00	1.423.245.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.	Belanja Bantuan Partai Politik	1.423.245.000,00	1.423.245.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	155.931.000,00	155.931.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	116.249.000,00	116.249.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	242.762.000,00	242.762.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Partai Golongan Karya (Golkar)	237.810.000,00	237.810.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	165.077.000,00	165.077.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Partai Demokrat	151.585.000,00	151.585.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Partai Amanat Nasional (PAN)	119.571.000,00	119.571.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	101.883.000,00	101.883.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.12	Belanja Bantuan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	72.587.000,00	72.587.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.990.006.849.000,00	1.996.308.209.000,00	6.301.360.000,00	0,32	
	Surplus/(Defisit)	1.939.167.464.000,00	1.932.866.104.000,00	(6.301.360.000,00)	(1,37)	
		86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	38,57	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	38,57	
8.	Rekening Koran Antar Unit	86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	38,57	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	41,82	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	80.150.000.000,00	113.670.444.135,00	33.520.444.135,00		
	DAERAH TAHUN SEBELUMNYA					
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang Sah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	67.650.000.000,00	101.170.444.135,00	33.520.444.135,00	49,55	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	5.000.000.000,00	8.451.360.000,00	3.451.360.000,00	69,03	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	2.000.000.000,00	2.850.000.000,00	850.000.000,00	42,50	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000.000,00	47.787.647.280,00	19.287.647.280,00	67,68	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.04.	Belanja Modal	29.250.000.000,00	39.181.436.855,00	9.931.436.855,00	33,95	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.11.	Belanja Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	6.756.239.000,00	6.756.239.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	6.756.239.000,00	6.756.239.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.01.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Dua	990.019.800,00	990.019.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.02.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Empat	2.766.219.200,00	2.766.219.200,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.03.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada Kelompok Masyarakat (Koperasi)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	38,57	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pembiayaan neto	86.906.239.000,00	120.426.683.135,00	33.520.444.135,00	38,57	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	2.026.073.703.000,00	2.053.292.787.135,00	27.219.084.135,00	1,34	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA